

## **ISTISHAB SEBAGAI DALIL SYAR'I DAN PERBEDAAN ULAMA TENTANG KEDUDUKANNYA**

### ***Abstrak***

**Efendi Sugianto**

[efendisueiuintia@gmail.com](mailto:efendisueiuintia@gmail.com)

Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia

### ***Abstrak***

*Istishab dalam Islam merupakan upaya mendekatkan satu peristiwa hukum dengan peristiwa lainnya sehingga keduanya dinilai sama hukumnya. Lebih lengkapnya, mengutip jurnal Istishab dan Hukumnya dalam Islam oleh Ridwan, istishab pada dasarnya merupakan suatu metode penemuan hukum berdasarkan hukum yang sudah ada sebelumnya selama belum ada dalil (bukti hukum) baru yang menyatakan sebaliknya. Konsep istishab sebagai metode hukum mengandung tiga unsur pokok, yakni: waktu. Istishab menghubungkan tiga waktu sebagai satu kesatuan yaitu waktu lampau, sekarang, dan yang akan datang. Ketiganya dalam istishab dianggap sama nilainya sampai terbukti ada perubahan karakteristik hukum yang melekatnya. Ketetapan hukum. Ada dua ketetapan hukum, yaitu ketetapan hukum boleh (isbat) dan ketetapan hukum yang tidak membolehkan (nafy) Dalil. Istishab sebagai metode penetapan hukum berpusat pada pengetahuan seseorang atas dalil hukum. Pengetahuan inilah yang menjadi kerangka dasar dalam menetapkan posisi hukum asalnya.*

**Kata Kunci:** *istishab, Dalil Syar'I dan Perbedaan Ulama*

## A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum Islam terdapat dua ketentuan landasan hukum atau dalil hukum yang menurut para jumhur ulama ada dalil hukum yang disepakati dan dalil hukum yg tidak disepakati oleh ulama fiqh. Adapun landasan hukum yang disepakati oleh para ulama yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Sedangkan landasan hukum Islam yang tidak disepakati antara lain Istihsan, Istishab dan Marsalah Mursalan dan yang akan kita bahas salah satunya adalah *Istishab*. (Pasaribu, 2016)

*Istishab* sendiri adalah dalil syar'i terakhir yang dapat digunakan sebagai rujukan oleh mujtahid untuk mengetahui hukum dari permasalahan yang dihadapinya apabila tidak terdapat penjelasan dalam al-Qur'an dan as-sunnah.

Dalam peristilahan ahli ushul, *istishab* berarti menetapkan hukum menurut keadaan yang terjadi sebelumnya sampai ada dalil yang mengubahnya. Dalam ungkapan lain, ia diartikan juga sebagai upaya menjadikan hukum peristiwa yang ada sejak semula tetap berlaku hingga peristiwa berikutnya, kecuali ada dalil yang mengubah ketentuan itu. (Mufid, 2018)

## B. Pengertian *Istishab*

Menurut bahasa *istishab* berarti mencari sesuatu yang ada hubungannya. Sedangkan secara istilah, menurut ulama fiqh yaitu menetapkan pada hukum yg telah ada dari suatu peristiwa atau kejadian sampai ada dalil yang mengubah ketetapan hukum tersebut, atau dengan kata lain menyatakan tetapan hukum pada masa lalu, sampai ada dalil yang mengubah ketetapan hukum tersebut. (Misbahuzzulam, 2013)

Pendapat lainnya mengenai *istishab* yakni, menurut al-Asnawi *istishab* adalah penetapan hukum berdasarkan adanya sesuatu pada masa kini berdasarkan adanya sesuatu tersebut pada masa yang telah lalu. Menurut Abdur Rahman I. Doi *istishab* adalah dugaan dalam hukum pembuktian sehingga suatu keadaan masalah yang diketahui pada masa lalu terus ada sampai kebalikannya dapat terbukti. Sedangkan pengertian *istishab* menurut al-Syaukani adalah apa yang telah ditetapkan pada masa lalu, pada dasarnya masih dapat dilestarikan pada masa yang akan datang selama tidak didapati sesuatu yang mengubahnya. (Haq, 2017)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya *istishab* adalah penetapan hukum atas sesuatu berdasarkan ketetapan hukum yang terdahulu, sampai adanya dalil yang dapat membuktikan perubahan hukumnya.

### C. Landasan *Istishab*

Adapun landasan dari *istishab* menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 29 yakni:

Terjemahnya: *Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.* (al-Baqarah: 29)

Dalam ayat yang lainnya Allah juga berfirman:

Terjemahnya: *Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.* (al-Jaatsiyah: 13)

Terjemahnya: *Tidaklah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.* (Luqman: 20)

Dalam beberapa ayat tersebut diatas Allah menjelaskan bahwasanya apa yang ada di langit dan bumi semuanya untuk manusia, dan tidaklah apa yang ada di langit dan bumi itu dijadikan dan ditaklukkan untuk manusia, kecuali hal itu diperbolehkan bagi manusia karena seandainya itu dilarang, niscaya bukan untuk manusia semua itu diciptakan. (Qorib & Harahap, 2016)

### D. Pandangan Ulama Terhadap *Istishab*

Ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan *istishab* sebagai metode *ijtihad* ketika tidak ada keterangan dalam dalil al-Qur'an dan sunnah. Ada yang menerima dan ada pula yang menolaknya. Ulama yang menerima *istishab* sebagai metode penetapan hukum memberikan argumen sebagai berikut: (Zainuddin, 2015)

1. Telah nyata terjadi *ijma'* mengenai perihal ketidakbolehan shalat seseorang yang sejak semula sudah ragu apakah ia sudah mempunyai wudhu atau belum. Lalu apabila seseorang ragu apakah masih mempunyai wudhu atau tidak, maka ia ditetapkan masih mempunyai wudhu dan boleh shalat. Dengan demikian, keadaan awal harus dijadikan patokan, apabila mempunyai wudhu keadaan ini yang berlaku dan apabila tidak mempunyai wudhu keadaan ini pula yang berlaku. Sekiranya tidak demikian cara menetapkannya, tentu akan bertentangan dengan *ijma'*. Cara menetapkan hukum yang demikian itu merupakan wujud dari *istishab*.

2. Para ahli pikir dan *'urf* meyakini eksisnya sesuatu atau tidak eksisnya sesuatu dengan kondisi tertentu, membolehkan penetapan putusan pada masa kemudian dari masa eksis atau tidak eksisnya sesuatu itu. Maka mereka menetapkan kebolehan berkorespondensi dengan orang yang semula

diketahui eksis dirinya, tetapi hilang untuk waktu yang lama, dan diakui pula efektifnya *wadi'ah* dan *rahn* orang yang bersangkutan. Hal ini jelas menunjukkan prinsip *istishab*.

3. Aturan –aturan hukum *syara'* yang pernah ada pada masa Rasulullah, juga berlaku bagi kita yang hidup setelah masa tersebut. Jadi kita juga terkena *taklif* aturan tersebut. Hal demikian didasarkan atas logika prinsip *istishab*, yakni yang sudah ada tetap diakui ada sebagaimana adanya.

4. Keadaan ragu yang timbul terhadap akad perkawinan mengimplikasikan haramnya si laki-laki berhubungan terhdap si perempuan, si laki-laki itu ragu apakah telah berakad atas si perempuan itu atau tidak. Keadaan ragu yang timbul terhadap talak tidak menyebabkan haranya si suami menggauli si istri, si suami ragu apakah telah mentalak istrinya atau tidak. Dalam dua kasus sesungguhnya tidak ada yang berbeda. Pada kasus pertama terjadi *istishab* terhadap kondisi yang ada yakni ketiadaan akad sebelum timbul keraguan. Sedangkan pada kasus kedua terjadi *istishab* pada kondisi yang ada yakni adanya akad. Sekiranya *istishab* tidak menunjukkan adanya dugaan yang kuat atas keterusan berlakuan tentu hukum dari kedua itu sama. (Haq, 2017)

Adapun ulama yang menolak *istishab* sebagai metode *ijtihad* memberikan argumen sebagai berikut:

1. Telah ada *ijma'* bahwa keterangan yang bersifat menetapkan harus di prioritaskan daripada keterangan yang bersifat mengingkari. Maksudnya adalah sekiranya yang menjadi kaidah pokok itu adalah sifat lestarnya sesuatu maka keterangan yang bersifat mengingkari itu, karena berlawanan dengan kaidah pokok tersebut maka lebih layak untuk diprioritaskan.

2. Eksisnya hukum pada masa berikutnya itu tidak ditunjukkan oleh suatu dalil, dan penetapan hukum tanpa dalil sama sekali kesiasian, oleh karenanya *istishab* bukan *hujjah* yang *syar'iyah*.

3. Dalam fiqh mazhab syafi'i, tindakan membayar kafarah dengan cara memerdekakan budak yang hilang, tidaklah sah secara *syar'iy* dan sekiranya yang menjadi kaidah pokok itu adalah sifat lestarnya sesuatu, tentu tindakan membayar *kafarah* dengan cara demikian itu sah hukumnya. (Qorib & Harahap, 2016)

Sedangkan menurut al-Syaukani terdapat beberapa pendapat ulama *usbul* yaitu:

1. *Istishab* dapat dijadikan sebagai alasan hukum secara mutlak. Inilah pendapat ulama Malikiyyah, mayoritas ulama Syafi'iyah, ulama Hanabilah, dan ulama Zahiriyyah.

2. *Istishab* tidak dapat dijadikan sebagai alasan hukum, karena untuk menetapkan suatu hukum harus dengan dalil, hukum yang ditetapkan pada masa lalu tidak dengan dalil tidak dapat dilestarikan sampai sekarang, dan mujtahid sekarang harus berijtihad menetapkan hukumnya dengan metode-metode lain. Inilah pendapat ulama Hanafiyyah dan ulama kalam, diataranya Abu al-Husain al-Bashri.

3. *Istishab* hanya berlaku dalam hubungan seorang mujtahid dengan Tuhannya, karena ketika seorang mujtahid tidak mendapatkan dalil suatu hukum, maka hukum yang telah ada merupakan rujukan maksimal baginya, tetapi itu hanya berlaku sebagai pegangan bagi mujtahid itu sendiri, bukan sebagai alasan dalam penetapan hukum. (Rusfi, 2014)
4. *Istishab* hanya dapat diberlakukan untuk menafikan suatu kasus, bukan untuk menetapkan hukumnya. Disebutkan oleh al-Kayy bahwa ini adalah pendapat ulama *muta'akhirin* Hanafiyah.
5. *Istishab* hanya dapat dipakai untuk men-tarjih hukum suatu kasus. Menurut Abu Ishaq, inilah pendapat yang sah dari al-Syafi'i, tetapi al-Syafi'i tidak menggunakannya sebagai alasan hukum.
6. *Istishab* boleh digunakan secara mutlak untuk menafikan suatu hukum, tetapi jika dipakai untuk menetapkan hukum baru, dalam hal ini ada yang membolehkan dan ada pula yang yang memandang tidak boleh, tergantung pada bentuk *istishab* yang ingin diterapkan.
7. Al-Syaukani memandang *istishab* merupakan salah satu metode ijtihad untuk mendapatkan suatu ketentuan hukum. Akan tetapi al-Syaukani tidak dapat menerima segala bentuk *istishab*. Ia hanya menerima dua bentuk *istishab* yakni, pertama *Istishab* yang ditunjukkan oleh akal dan syara' kebolehan pelestarian dan pemberlakuannya. kedua *Istishab al'adam al-asbli* atau disebut juga *bara'ah al-adzimmah*, yakni kebebasan asli yang dimiliki oleh manusia. (Muhaimin, 2018)

## **E. Prinsip-prinsip Istishab**

Para ulama ushul menetapkan beberapa kaidah umum yang didasarkan pada metode *istishab*, yakni sebagai berikut:

1. Asal sesuatu itu adalah ketetapan yang telah ada menurut keadaan, semula, sehingga terdapat ketetapan sesuatu yang mengubahnya.
2. Asal segala sesuatu adalah kebolehan
3. Apa yang tetap karena keyakinan tidak akan hilang karena keraguan
4. Asal pada manusia adalah kebebasan. (Shalihah, 2018)

## **F. Macam-macam Istishab**

Para ulama ushul Fiqih mengemukakan bahwa *istishab* itu ada lima macam, Yaitu

1. *Istishab hukm al-ibahah al-ashliyah*. Maksudnya, menetapkan hukum sesuatu yang bermanfaat bagi manusia adalah boleh, selama belum ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Contohnya: seluruh pepohonan yang ada di hutan merupakan milik bersama manusia dan masing-masing

berhak menebang dan mengambil memanfaatkan pohon dan buahnya, sampai pada bukti yang menunjukkan bahwa hutan itu telah menjadi milik orang.

2. *Istishab Al-Bara'at Al Ashliyah*. Yaitu kontinuitas hukum dasar ketiadaan berdasarkan argumentasi rasio dalam konteks hukum-hukum syar'i. Maksudnya memberlakukan kelanjutan status ketiadaan dengan adanya peniadaan yang dibuat oleh akal lantaran tidak adanya dalil syar'i yang menjelaskannya. Dalam objektivitasnya, istishab tersebut bereferensi kepada hukum akal dalam hukum ibadah atau *baraatul ashliyah* (kemurnian menurut aslinya). Akal menetapkan bahwa dasar hukum pada segala yang diwajibkan adalah dapat diwajibkan sesuatu, kecuali apabila datang dalil yang tegas mewajibkannya. Contoh: hukum wudhu seseorang dianggap berlangsung terus sampai adanya penyebab yang membatalkannya.

3. *Istishab Al-'Umumi*. *Istishab* terhadap dalil yang bersifat umum sebelum datangnya dalil yang mengkhususkannya dan *istishab* dengan nash selama tidak ada dalil yang nash (yang membatalkannya). Suatu nash yang umum mencakup segala yang dapat dicakup olehnya sehingga datang suatu nash lain yang menghilangkan tenaga pencakupannya itu dengan jalan *takehsish*. Atau sesuatu hukum yang umum, tidaklah dikecualikan sesuatupun daripadanya, melainkan dengan ada suatu dalil yang khusus. Contohnya: kewajiban puasa yang berlaku bagi umat sebelum Islam, tetap wajib bagi umat Islam (QS.Al-Baqarah : 183) selama tidak ada nash lain yang membatalkannya.

4. *Istishab An-Nashbi (Istishab Maqlub/Pembalikan)*. Yaitu istishab pada kondisi sekarang dalam menentukan status hukum pada masa lampau, sebab istishab pada bentuk-bentuk sebelumnya, merupakan penetapan sesuatu pada masa kedua berdasarkan ketetapan pada masa pertama lantaran tidak ditemukannya dalil secara spesifik. Urgensinya, dalam suatu dalil (nash) terus-menerus berlaku sehingga di-nasakh-kan oleh sesuatu nash, yang lain. Contoh: kasus adanya seseorang yang sedang dihadapkan pertanyaan, apakah Muhammad kemarin berada di tempat ini?, padahal kemarin ia benar-benar melihat Muhammad disini. Maka ia jawab, benar ia berada disini kemarin.

5. *Istishab Al-Washfi Ats-Tsabit*. Sesuatu yang telah diyakini adanya, atau tidak adanya masa yang telah lalu, tetaplah hukum demikian sehingga diyakini ada perubahannya. Disebut pula dengan *istishabul madhi bilhali* yakni menetapkan hukum yang telah lalu sampai kepada masa sekarang. Yaitu istishab terhadap hukum yang dihasilkan dari ijma' dalam kasus yang dalam perkembangannya memicu terjadinya perselisihan pendapat. Contoh: Kasus orang yang bertayamum, dalam pertengahan shalat melihat air. Menurut ijma' ditetapkan shalatnya tidak batal, keabsahan shalat itu ditentukan sebelum melihat air. Hal ini menunjukkan pula pada keberlanjutan

ketetapan hukum, sampai ditemukan adanya dalil yang menunjukkan batalnya penetapan tersebut. (Muhaimin, 2018)

## **G. Kesimpulan**

*Istishab* adalah penetapan hukum atas sesuatu berdasarkan ketetapan hukum yang terdahulu, sampai adanya dalil yang dapat membuktikan perubahan hukumnya. *Istishab* sendiri adalah dalil syar'i terakhir yang dapat digunakan sebagai rujukan oleh mujtahid untuk mengetahui hukum dari permasalahan yang dihadapinya apabila tidak terdapat penjelasan dalam al-Qur'an dan as-sunnah. Ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan *istishab* sebagai metode *ijtihad*, ketika tidak ada keterangan dalam dalil al-Qur'an dan sunnah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Haq, h. (2017). Penggunaan istishab dan pengaruhnya terhadap perbedaan ulama. *Al hurriyah: jurnal hukum islam*, 2(1), 17–30.
- Misbahuzzulam, m. (2013). Istishab: sejarah dan posisinya. *Al-majaalis: jurnal dirasat islamiyah*, 1(1), 107–132.
- Mufid, m. (2018). *Ushul fiqh ekonomi dan keuangan kontemporer: dari teori ke aplikasi*. Kencana.
- Muhaimin, u. (2018). Metode istidlal dan istishab (formulasi metodologi ijtihad). *Yudisia: jurnal pemikiran hukum dan hukum islam*, 8(2), 330–350.
- Pasaribu, m. (2016). Maslahat dan perkembangannya sebagai dasar penetapan hukum islam. *Justitia: jurnal ilmu hukum dan humaniora*, 1(04).
- Qorib, a., & harahap, i. (2016). Penerapan masalah mursalah dalam ekonomi islam. *Journal analytica islamica*, 5(1), 55–80.
- Rusfi, m. (2014). Validitas masalah mursalah sebagai sumber hukum. *Al-'adalah*, 12(1), 63–74.
- Shalihah, s. (2018). Al-istihsab (sebuah teori dan praktik prinsip-prinsip nahwu arab). *Al-ittijah: jurnal keilmuan dan kependidikan bahasa arab*, 10(2), 53–66.
- Zainuddin, f. (2015). Konsep islam tentang adat: telaah adat dan'urf sebagai sumber hukum islam. *Lisan al-bal: jurnal pengembangan pemikiran dan kebudayaan*, 9(2), 379–396.